

Siaran Pers

OUTLOOK PEMBANGUNAN INDONESIA 2018: UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Jakarta, 18 Desember 2017 – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan **Forum Merdeka Barat 9 dalam bentuk Diskusi Akhir Tahun dan Temu Media** dengan tema **“Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik”**. Acara yang dilaksanakan di Gedung Widjojo Nitisastro, Bappenas tersebut menghadirkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sebagai narasumber. Dalam sambutan pembuka, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi prioritas pemerintah Indonesia pada 2018. “Pemerintah akan melaksanakan strategi kebijakan yang menasar 40 persen penduduk termiskin, dengan perhatian khusus pada penyediaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar beliau.

Kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang meliputi Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai dan bantuan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, bantuan iuran kesehatan bagi 92.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah fokus terhadap percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (merata ke seluruh desil pendapatan), tingkat kemiskinan pada 2045 dapat mendekati nol (0,02 persen).

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi juga dibidik sebagai penggerak ekonomi rakyat, dengan memperhatikan aspek registrasi usaha skala mikro dan kecil, pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, juga akses UMKM untuk mendapat kredit, dan perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi. Wirausaha juga menjadi fokus pembangunan, dengan target meningkatkan partisipasi wirausaha untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja. Persentase wirausaha terhadap jumlah penduduk Indonesia pada periode 2016—2017 tercatat masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 3,1 persen. Kunci peningkatan dan penguatan iklim kewirausahaan adalah inovasi dan transfer teknologi serta penelitian dan pengembangan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat. Sesuai data Human Development Report Office of the United Nations Development Programme (UNDP), IPM Indonesia pada 2015 menempati peringkat 113 dari 188 negara.

“Sebagai pendukung kebijakan-kebijakan tersebut, upaya pemerataan melalui kebijakan redistribusi fiskal berkeadilan juga menjadi perhatian pemerintah,” tutur Menteri Bambang. Upaya tersebut meliputi fokus untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, mencakup penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan iklim investasi (insentif bagi investasi padat pekerja), peningkatan iklim ketenagakerjaan yang menguntungkan pekerja dan pengusaha, serta perbaikan sistem perpajakan. Produktivitas ekonomi juga ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian, pemilihan jenis industri yang lebih beragam dan produksi yang memiliki nilai tambah, serta perluasan akses pengelolaan lahan bagi penduduk kurang mampu. Pengembangan ekonomi produktif dan UMKM juga ditingkatkan, melalui pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal, peningkatan layanan keuangan mikro, dan optimalisasi akses produksi.

Selain itu, upaya pemerataan melalui kebijakan redistribusi fiskal berkeadilan juga didorong implementasi perlindungan sosial yang meliputi perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk rentan dan pekerja informal, perluasan cakupan dan manfaat melalui integrasi bantuan sosial, serta peningkatan pemenuhan hak dasar, termasuk inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok marjinal. Pelayanan dasar juga wajib tersedia, dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar dan penjangkauan pelayanan dasar yang lebih luas. Lebih lanjut, integrasi program penanggulangan kemiskinan seperti pelaksanaan perlindungan sosial berdasarkan pendekatan siklus hidup (*life-cycle*), penerima bantuan menerima manfaat lengkap (tidak terfragmentasi) melalui *single targeting framework* untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan pembangunan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan pangan non tunai, akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak dua persen poin. “Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bantuan sosial dan subsidi disalurkan non tunai melalui sistem perbankan agar mendukung keuangan inklusi melalui peningkatan perilaku produktif dan akses layanan keuangan,” tutup Menteri Bambang.

Jakarta, 18 Desember 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id



FORUM MERDEKA BARAT 9

Informasi Akurat, Data Valid, dan Narasumber Terpercaya

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon/faksimile: (021) 3521538
<http://www.FMB9.id>